

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DALAM INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Oleh: Dhyah Setyorini, Rr. Indah Mustikawati, Arin Pranesti, Indarto Waluyo, Alya Nurul Anggari, Intan Shafa Fajariyah

ABSTRAK

Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia memiliki rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah jika dibandingkan dengan rasio dunia. Penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti di bidang akuntansi karena memiliki variasi yang tinggi di masing-masing negara. Selain itu, penelitian ini termotivasi karena penelitian sebelumnya memiliki hasil yang relatif tidak konklusif sehingga dimungkinkan ada fenomena lain yang belum dapat dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang kualitas audit yang baik memengaruhi hubungan koneksi politik, *corporate governance*, dan penghindaran pajak.

Metoda penelitian yang digunakan pada penelitian ini berjenis metoda kuantitatif dengan menggunakan sampel perusahaan pada industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019 sebanyak 510 amatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan variabel Koneksi Politik tidak memiliki berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak sedangkan tata kelola Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Untuk tata kelola Corporate Governance yang mencakup Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Hipotesis Kualitas Audit memoderasi Koneksi Politik dan Praktik penghindaran Pajak didukung. Adapun moderasi Kualitas Audit pada hubungan tata kelola Corporate Governance dan Praktik Penghindaran Pajak hanya berpengaruh untuk variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Untuk Kepemilikan Institusional tidak terbukti memoderasi hubungan tata kelola Corporate Governance dan Praktik Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Praktik Penghindaran Pajak, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit